



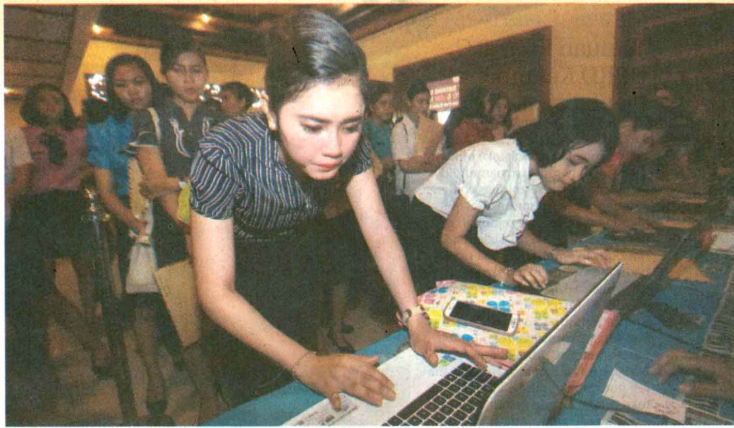
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jogja Munazar

Soroti Tingginya Pengangguran dan Ketimpangan Sosial-Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Jogja pada 2026 berada di kisaran 5,06 hingga 6,03 persen. Namun di balik harapan pulihnya ekonomi pasca-pandemi, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jogja Munazar mengingatkan adanya tantangan struktural yang kompleks. Mulai dari tingginya pengangguran hingga ketimpangan sosial-ekonomi yang menganga.

MUNAZAR menyatakan, angka pengangguran di Kota Jogja di kisaran 5,4 hingga 5,7 persen. Selain itu, rasio gini pun mendekati 0,45 persen. Sehingga mengindikasikan jurang ketimpangan yang signifikan dan pertumbuhan ekonomi belum merata.

Menurutnya, ketergantungan Kota Jogja pada sektor jasa seperti akomodasi, kuliner, dan hiburan harus menjadi perhatian. Meskipun potensial, sektor tersebut cenderung lebih rentan terhadap dinamika eksternal. Mulai dari penurunan wisatawan hingga gejala ekonomi nasional. "Pemerintah perlu memaksimalkan sektor-sektor riil seperti UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pelatihan vokasional," ungkapnya kepada *Radar Jogja* Kamis (23/10).
 Sehingga, lanjutnya, bisa tercipta pilar ekonomi yang tidak hanya dinikmati oleh segelintir kalangan. Kemudian dari sisi pendapatan daerah, politisi Partai Golkar ini



DOCUMENTASI RADAR JOGJA

MASIH TINGGI: Pertumbuhan ekonomi Kota Jogja pada 2026 diproyeksikan mencapai 5,06 hingga 6,03 persen. Namun, angka pengangguran di Kota Jogja berada di kisaran 5,4 hingga 5,7 persen.

juga menyoroti sistem pemkot yang masih menerapkan pola tradisional. Misalnya hanya bergantung dengan pajak hotel, restoran dan hiburan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Munazar menilai, hal tersebut cukup berisiko karena ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, dia berharap agar pemkot mulai menggarap potensi pendapatan yang belum menonjol. Misalnya BUMD, retribusi pasar tradisional dan parkir, serta perizinan usaha.

"Sektor-sektor tersebut saya rasa sampai saat ini belum tergarap

optimal," katanya. Lebih lanjut, legislatif yang berangkat dari wirausahawan ini juga menyoroti ketergantungan pemkot terhadap dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat membuat perekonomian lokal rentan terhadap perubahan kebijakan nasional.

Selain itu, struktur belanja daerah di Kota Jogja juga menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Pengeluaran rutin, khususnya belanja pegawai mendominasi dan hampir mencapai setengah dari total belanja. Sementara itu, belanja modal yang seharusnya menjadi

penggerak pembangunan dan transformasi ekonomi hanya dialokasikan sekitar 6,9 persen.

"Belanja modal yang kecil ini belum dijelaskan secara rinci, dan dikhawatirkan akan berujung pada proyek-proyek yang tidak berdampak langsung pada warga," kritik Munazar.

Dia pun menyoroti soal kebijakan pemkot yang cenderung terlalu berhati-hati dengan hanya mengandalkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dari tahun-tahun sebelumnya. Sikap tersebut menurutnya aman secara fiskal. Namun berisiko membuat daerah kehilangan peluang untuk

melakukan investasi strategis jangka menengah.

Oleh karena itu, melalui ketugasannya di Komisi B, Munazar mendorong pemkot untuk lebih berani mengeksplorasi alternatif pembiayaan lain. Contohnya lewat pinjaman daerah, pemanfaatan aset, potensi kerja sama pemerintah dan swasta, dan mulai mengeruk peluang sektor digital. Serta penyertaan modal ke BUMD yang harus didukung evaluasi jelas dan proyeksi yang realistis.

"Secara umum, arah kebijakan umum anggaran 2026 sudah positif. Namun diperlukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah inovatif," tandas Munazar. (*/inu/eno/by)

●●

Secara umum, arah kebijakan umum anggaran 2026 sudah positif. Namun diperlukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah inovatif."

Munazar
 Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jogja



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005